

Better Policies Better Lives

# About KSI



# TENTANG KSI

## APAKAH KNOWLEDGE SECTOR INITIATIVE ITU?

Sebagai negara yang besar dan kaya akan keberagaman, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan untuk menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, para pembuat kebijakan membutuhkan bukti yang berkualitas dalam penyusunan kebijakan publik.

Knowledge Sector Initiative (KSI) mendukung para pembuat kebijakan di Indonesia untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif melalui penggunaan bukti yang lebih baik dari penelitian, data, dan analisis. KSI bekerja dengan peneliti dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas penelitian dan relevansinya terhadap kebijakan. KSI juga bekerja untuk mendukung penguatan peraturan dan praktik yang mendukung penelitian berkualitas untuk memudahkan penggunaan bukti dalam penyusunan kebijakan.

KSI adalah kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

KSI dikelola oleh RTI International, bekerja sama dengan Nossal Institute dari University of Melbourne, Overseas Development Institute, dan Australian National University.

## APA YANG INGIN DILAKUKAN KSI?

Tujuan umum KSI adalah meningkatkan penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Program ini menitikberatkan pada:

- Penelitian kebijakan yang lebih berkualitas dan komunikasi yang lebih efektif
- Alokasi anggaran yang lebih besar dan lebih baik untuk penelitian kebijakan
- Manajemen, ketersediaan dan aksesibilitas data dan informasi yang lebih baik untuk penyusunan kebijakan

KSI bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala mendasar yang menghambat sektor pengetahuan di Indonesia, baik dari sisi penyediaan maupun penggunaan bukti berkualitas dalam penyusunan kebijakan.

## APA SAJA HAMBATAN BAGI SEKTOR PENGETAHUAN YANG SEHAT?

### Pendanaan penelitian dan efisiensi pengeluaran

Pendanaan penelitian di Indonesia relatif rendah dibandingkan di negara berpenghasilan menengah atas lainnya. Agenda penelitian yang lebih jelas dapat mendorong penggunaan dana yang lebih baik dan menjadikan penelitian lebih selaras dengan kebutuhan pembuat kebijakan, namun masih banyak upaya yang perlu dilakukan. Selain itu, sektor swasta juga dapat meningkatkan kontribusinya pada pendanaan penelitian.

### Lingkungan penelitian

Regulasi yang rumit mempersulit penelitian. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penelitian menghadapi tantangan dalam mengatasi fungsi yang tumpang tindih. Regulasi baru berpotensi mengurangi beban

# ABOUT KSI

## WHAT IS THE KNOWLEDGE SECTOR INITIATIVE?

Indonesia is a large and diverse country facing increasingly complex policy challenges. Decision makers working on public policies to address these challenges need access to quality and timely evidence about the potential - and actual - impacts of their decisions.

The Knowledge Sector Initiative (KSI) supports Indonesian policymakers to develop more effective development policies through better use of research, data, and analysis. KSI works with research providers and government agencies to strengthen the quality and policy-relevance of research and how it's used for policymaking. KSI also works to improve regulations and practices that support quality research and make using evidence in policymaking easier.

KSI is a partnership between the governments of Indonesia and Australia. It is funded by the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and implemented in cooperation with the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas).

KSI is managed by RTI International, in association with the Nossal Institute at the University of Melbourne, the Overseas Development Institute and the Australian National University.

## WHAT DOES KSI AIM TO DO?

KSI's overall goal is to improve the use of evidence in development policymaking. The program focuses on:

- Better quality and more effective communication of policy research
- More and better spending on policy research
- Better management, availability and accessibility of data and information for policymaking

KSI aims to address the underlying barriers holding back Indonesia's knowledge sector. These barriers hamper both the production and use of quality evidence to inform policymaking.

## WHAT ARE THE BARRIERS TO A HEALTHY KNOWLEDGE SECTOR?

### Funding for research and efficiency of spending

Public funding for research is relatively low compared to other low middle income countries. Clearer research agendas are slowly improving the way funding is spent and aligning research with policymakers' needs, but there is still a long way to go. The private sector currently contributes a very small proportion of all funding for research.

### The research environment

Heavy regulation has made doing research difficult. Government agencies responsible for research face challenges in coordinating with each other and addressing overlapping functions. New regulations can potentially reduce researchers' administrative burden, but relevant agencies still need to understand the rules to make them effective. A new procurement regulation introduced in 2018

administrasi peneliti, namun lembaga terkait masih perlu memahami aturan-aturan tersebut agar pelaksanaannya efektif. Regulasi baru tentang pengadaan yang diberlakukan pada 2018 memberi peluang bagi para pembuat kebijakan untuk menugaskan penelitian pada universitas maupun lembaga penelitian lain, namun masih membutuhkan waktu lebih lama hingga regulasi tersebut dapat sepenuhnya dijalankan.

### **Permintaan atas penelitian**

Sesungguhnya kalangan pembuat kebijakan secara umum sudah memahami bahwa kebijakan perlu didasari bukti. Namun, urgensi untuk menghasilkan kebijakan dan terbatasnya pendanaan terkadang membuat penelitian dikesampingkan. Selain itu, meskipun konsep gender dan inklusi sosial perlahan semakin mendapatkan perhatian, permintaan penelitian kedua bidang tersebut saat ini masih rendah dan pemahaman tentang bagaimana menyikapinya dalam pembuatan kebijakan pun masih terbatas.

### **Kualitas penelitian dan analisis**

Universitas-universitas menghadapi kesulitan untuk memberikan pelatihan penelitian yang memadai. Selain itu, *peer review* belum menjadi sesuatu yang lazim dilakukan. Walau sudah ada upaya untuk menaikkan gaji dosen dan peneliti, universitas-universitas terkemuka masih sulit memikat tenaga-tenaga terbaik karena tawaran insentif yang diberikan masih belum kompetitif. Struktur insentif saat ini membuat akademisi lebih fokus mengajar dan melakukan kerja administrasi, alih-alih meneliti. Walau diadakannya posisi 'analisis kebijakan' dalam aparat sipil negara patut disambut sebagai langkah positif, lembaga pemerintah masih perlu memperkuat kapasitas analisis kebijakan secara internal.

### **Ketersediaan dan aksesibilitas data**

Pembuat kebijakan kini semakin menyadari manfaat menjadikan data lebih mudah diakses. Namun dalam praktiknya data masih jarang dibagikan antar lembaga pemerintah dan sistem-sistem data belum terintegrasi dengan baik. Baru sedikit data pemerintah yang dibuka ke publik. Regulasi, kebijakan, dan prosedur pengumpulan, klasifikasi, kualitas, privasi, dan perlindungan data masih perlu diperbaiki dan diperkuat. Terlepas berbagai perkembangan baik terkini, pengumpulan data dan analisis tentang masalah gender dan inklusi sosial juga masih perlu ditingkatkan.

### **Hubungan antara peneliti dan pembuat kebijakan**

Para peneliti dan pembuat kebijakan sering mengandalkan jejaring pribadi dalam berinteraksi, dan interaksi ini pun umumnya bersifat informal. Pembuat kebijakan masih kesulitan mendapatkan penelitian yang relevan dengan kebijakan. Selain itu, temuan penelitian masih perlu dikomunikasikan dengan cara yang lebih mudah dipahami, dengan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.

## **APA HASIL YANG INGIN DICAPAI KSI?**

- Adanya mekanisme pendanaan penelitian kebijakan yang lebih baik dan terhubungnya pendanaan dengan kebutuhan pembuat kebijakan.
- Para peneliti dan akademisi di universitas mendapatkan insentif yang lebih baik untuk menghasilkan penelitian kebijakan berkualitas tinggi.
- Para peneliti, analis kebijakan, dan pembuat kebijakan meningkatkan interaksinya, berbagi pengetahuan dan bekerja sama.

provides an opportunity for policymakers to commission research from universities and think tanks, but it may take time for the regulation to be fully operationalised.

### **Demand for research**

Policymakers are often under pressure to roll out policies quickly, so they don't always prioritise research. There is some level of understanding on the need for evidence to inform policy among policymakers, but those who wish to carry out research often face funding constraints. While the concept of gender and social inclusion is slowly gaining traction, there is currently low demand for research in this area and limited understanding of how to address these issues in policymaking.

### **Quality of research and analysis**

Universities are struggling to provide adequate research training and peer review is not a common practice. Top universities are working to increase the salaries of lecturers and researchers, but low pay has made it challenging for the profession to attract top talent. The current incentive structures have led to academics focusing more on teaching and administration rather than research. The introduction of 'policy analyst' as a new position in the civil service is a positive move, but government agencies still need to strengthen their internal capacity in policy analysis.

### **Availability and accessibility of data**

Policymakers are more aware of the advantages of making data more accessible, but in practice data is rarely shared between government agencies and data systems aren't well-integrated. Only a small amount of government data is shared publicly. Regulations, policies, and procedures on data collection, classification, quality, privacy and protection still need improvement. Despite recent improvements, there remains a need to improve data collection and analysis on gender and social inclusion issues.

### **Links between researchers and policymakers**

Connections between researchers and policymakers often depend on personal networks and interaction is mostly informal and irregular. Policy-relevant research isn't readily available to policymakers. Research findings still need to be communicated in accessible ways, with actionable policy recommendations.

## **WHAT RESULTS DOES KSI AIM TO ACHIEVE?**

- There are better mechanisms for funding policy research, and funding is linked to the research needs of policymakers.
- Researchers and academics in universities have better incentives to do high-quality policy research.
- Researchers, policy analysts, and policymakers are increasingly interacting with each other, sharing knowledge and working together.
- Quality data on development planning, budgeting and performance is more available and accessible and data systems are better linked to each other.
- KSI's partner research organisations are increasingly financially sustainable and making an important contribution to evidence-informed policy in Indonesia.

- Data berkualitas tentang perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan lebih tersedia dan mudah diakses, dan sistem data terhubung lebih baik satu sama lain.
- Lembaga penelitian mitra KSI semakin mumpuni berkelanjutan secara finansial dan memberikan kontribusi penting pada kebijakan berbasis bukti di Indonesia.

## STRATEGI CROSS CUTTING

### Kesetaraan gender dan inklusi sosial

Pembuat kebijakan memerlukan akses yang lebih baik ke penelitian dan informasi tentang ketimpangan dan eksklusi serta berbagai dampak kebijakan terhadap perempuan dan kelompok yang mengalami eksklusi sosial. Dalam bidang kesetaraan gender dan inklusi sosial, KSI bertujuan untuk meningkatkan penggunaan bukti tentang isu-isu inklusi gender dan inklusi sosial dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

### Pelibatan pada tingkat daerah

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki tanggung jawab yang penting dalam penyusunan dan penerapan kebijakan. Meskipun sebagian besar fokus pada tingkat nasional, KSI bekerja melalui mitra dan jejaringnya untuk memperkuat ketersediaan penelitian dan analisis kebijakan bagi pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan data untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah.

### Pelibatan media

Meskipun Indonesia memiliki lanskap media yang dinamis, analisis berbasis bukti tentang isu kebijakan publik yang penting masih kurang terlihat di media Indonesia. KSI bekerja dengan beberapa mitra media untuk mempromosikan lebih banyak wacana publik tentang isu kebijakan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bukti dalam penyusunan kebijakan.

## BAGAIMANA CARA KERJA KSI?

Secara umum, KSI memosisikan diri sebagai katalis perubahan. Dengan pendekatan ini, upaya KSI berfokus pada mempertemukan pemangku kepentingan untuk membahas masalah, mengembangkan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut bersama-sama. KSI juga bekerja dengan mitra untuk mengembangkan pengetahuan baru dan menyebarkannya pada khalayak luas demi meningkatkan kesadaran, mendorong wacana, dan menggalang dukungan yang lebih luas bagi perubahan. Untuk memastikan perubahan tersebut berkelanjutan, KSI mendukung upaya perbaikan sistem dasar yang akan mendorong penggunaan bukti lebih baik dalam pembuatan kebijakan.

## SIAPA SAJA MITRA KSI?

Mitra KSI meliputi lembaga penelitian dan advokasi non-pemerintah, universitas, lembaga pemerintah, serta asosiasi profesional dan ilmiah. Mitra utama KSI di pemerintah pusat adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara.

KSI juga bermitra dengan universitas-universitas Australia dan organisasi internasional lainnya untuk memfasilitasi akses ke kepakaran, pengalaman, dan jejaring internasional, serta memperkuat hubungan antara lembaga Indonesia dan internasional.

## CROSS CUTTING STRATEGIES

### Gender equality and social inclusion

Policymakers need better access to research and information on inequality and exclusion and the different impacts that policies have on women and socially excluded groups. KSI's work on gender equality and social inclusion aims to improve the use of evidence on gender and social inclusion issues in development policymaking.

### Sub-national engagement

Local governments in Indonesia have significant responsibility for developing and implementing policy. Although KSI's work is mostly focused at the national level, the program is working through existing partners and their networks to strengthen the supply of policy research and analysis to local governments and improve the use of data for local development planning and budgeting.

### Engagement with the media

Although Indonesia has a vibrant media landscape, there is a shortage of evidence-informed analysis on important public policy issues in the Indonesian media. KSI is working with selected media partners to promote more evidence-informed public debate on policy issues and raise awareness of the importance of using evidence in making policy decisions.

## HOW DOES KSI WORK?

KSI's overall approach is to act as a catalyst for change. This means that KSI's work focuses on bringing stakeholders together to discuss problems, develop joint solutions, and work together to implement these. KSI also works with its partners to develop new knowledge and share this with a broader audience to raise awareness, promote debate, and mobilise broader support for change. To ensure that change is sustainable KSI works to improve the underlying systems that support better use of evidence in policymaking.

## WHO ARE KSI'S PARTNERS?

KSI's partners include non-government research and advocacy organisations, universities, government agencies, and professional and scientific associations. Our key national government partners are the National Development Planning Agency, the Ministry of Research, Technology and Higher Education, and the National Institute of Public Administration.

KSI also partners with Australian universities and other international organisations to facilitate access to international expertise, experience, and networks, and strengthen links between Indonesian and international institutions.